

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Pendidikan merupakan sebuah upaya untuk membentuk dan menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas. Pendidikan haruslah selaras dengan perkembangan zaman, dimana diperlukannya sumber daya manusia yang memiliki keterampilan abad 21 yakni *critical thinking* (berpikir kritis), *collaboration* (kemampuan bekerja sama), *communication* (kemampuan berkomunikasi) dan *creativity* (kreatifitas). Hal ini diperjelas dengan pengertian pendidikan menurut UU No. 20 Tahun 2003, yang menyatakan bahwa:

Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara efektif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat bangsa dan negara.

Oleh karena itu pendidikan seyogyanya dilakukan oleh orang-orang yang sadar dalam membangun generasi bangsa karena di dalam pendidikan diperlukan orang-orang yang bukan hanya kompeten dalam mengajar tetapi juga harus konsisten dan mau belajar menjadi pendidik yang bekerja secara efektif (Ball and Forzan, 2010, hlm. 498).

Pada pelaksanaannya, segala kegiatan pendidikan harus diarahkan untuk mencapai tujuan pendidikan. Tujuan Pendidikan Nasional yang terdapat dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional No. 20 Tahun 2003 pasal 3 yaitu:

Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan keterampilan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga Negara yang demokratis serta bertanggung jawab.

Untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional tersebut, diperlukan kerja sama antar komponen pendidikan baik dari guru, siswa, lingkungan pendidikan maupun kurikulum. Salah satu mata pelajaran yang diajarkan di sekolah adalah IPS (Ilmu Pengetahuan Sosial), IPS merupakan program pendidikan atau bidang studi dalam kurikulum sekolah yang mempelajari kehidupan manusia dalam masyarakat serta hubungan interaksi antara manusia dan lingkungan baik sosial maupun fisik.

Menurut Istianti et al (2007, hlm. 53) yang menjadi tujuan pendidikan IPS yaitu untuk menjadikan siswa sebagai warga negara yang memiliki pengetahuan, nilai, sikap dan keterampilan-keterampilan yang dapat dikembangkan untuk berperan aktif dalam kehidupan demokrasi.

Tujuan pendidikan nasional adalah agar terciptanya peserta didik yang demokratis dan bertanggungjawab. Namun dalam kenyataannya setiap peserta didik memiliki karakter dan latarbelakang yang berbeda termasuk potensi konflik didalamnya. Jika dihubungkan tujuan pendidikan nasional dengan Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial, maka Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial mampu mengantar siswa dari kondisi apa adanya (dengan sejumlah potensi konflik yang dimiliki siswa) kepada kondisi bagaimana seharusnya yaitu siswa yang mampu mengelola potensi konflik dan menyelesaikan konflik secara konstruktif. IPS bukan hanya sekedar mempelajari fakta, konsep dan ilmu-ilmu sosial saja tetapi juga mengembangkan berbagai keterampilan terpadu siswa baik dalam segi kognitif, afektif, psikomotor dan aksi sosial. Karena IPS dapat dijadikan ilmu untuk mengatur pola perilaku manusia, baik sebagai makhluk individu, maupun sebagai makhluk sosial maka IPS dapat memberikan peranan penting kepada siswa dalam penyelesaian konflik (resolusi konflik).

Menurut Maftuh (2010) konflik sebenarnya adalah salah satu aspek interaksi sosial manusia dan ia secara alamiah terjadi dalam kehidupan sosial. Beberapa orang atau suatu masyarakat dalam menghadapi atau menyelesaikan konflik mengambil sikap yang berbeda-beda, ada yang menyelesaikan konflik dengan sikap yang konstruktif dan ada pula yang destruktif. Sikap destruktif inilah yang dikhawatirkan berbahaya jika digunakan oleh siswa. Dengan pembelajaran IPS diharapkan siswa dapat menyelesaikan konflik yang dihadapinya secara konstruktif. Usia sekolah dasar tergolong dalam individu yang berkembang, usia pada tahap ini mempunyai karakteristik yang banyak menampilkan perbedaan. Tidak jarang perbedaan ini menjadi gesekan yang dapat berakibat konflik.

Di lapangan banyak kasus konflik yang terjadi di sekolah dasar sebagaimana disiarkan dalam berita Liputan 6 Jakarta diantaranya berdasarkan data Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) dari rentang tahun 2011-2019

terdapat 2.473 kasus *bullying* di sekolah. Tahun 2013 ada 3.379 kasus kekerasan di sekolah, sebanyak 16% atau 565 kasus diantaranya pelaku kekerasan itu anak-anak. Pada tahun 2014, ada 1.626 kasus kekerasan terhadap anak, 26% atau 455 kasus di antaranya pelaku kekerasan adalah anak-anak. Kemudian tahun 2015 ada 2.898 kasus di mana 59,30% kekerasan seksual dan sisanya kekerasan lainnya. Tahun 2018 kasus tawuran pelajar mencapai 144 kasus atau 32,35%, dan 73 kasus atau 16,50% merupakan kasus anak yang menjadi korban kebijakan. Kasus ini dapat menjadi gambaran bagi pendidik untuk melakukan pengawasan dan pencegahan dengan mengembangkan keterampilan penyelesaian masalah (resolusi konflik) melalui pendidikan.

Konflik di sekolah dasar biasanya disebabkan oleh hal-hal yang sepele misalnya mengejek teman, tidak mau berbagi, perbedaan pendapat saat diskusi, merasa tidak dihargai, berebut benda dan lainnya. Dari hal tersebut akan menimbulkan konflik antar siswa misalnya tawuran antar siswa, pemalakan, membuat geng yang mengganggu teman yang lain, perkelahian, *bullying* dan lainnya. Konflik di sekolah dasar jika dibiarkan akan menimbulkan banyak dampak negatif secara fisik maupun psikis. Menurut Wahyuningsih (2015) dalam tesisnya dampak konflik secara fisik seperti adanya luka, lebam, bengkak, goresan, mengeluh sering pusing dan sakit perut dan sebagainya. Sedangkan dampak psikis dari adanya konflik yaitu terlihat ketakutan untuk pergi ke sekolah, malu dan menarik diri dan lainnya. Ketika semangat anak untuk bersekolah sudah turun maka akan berdampak buruk bagi masa depannya. Konflik yang terjadi di sekolah dasar walaupun dalam skala kecil dan pelakunya masih dibawah umur bukanlah suatu hal yang dapat dianggap remeh. Pemahaman konflik di sekolah dasar menjadi *urgent* karena pada tahapan ini adalah dasar dari jenjang berikutnya.

Pendidikan merupakan jalan terkuat bagi siswa untuk memahami konflik dan resolusi konflik. Pentingnya pendidikan untuk menyelesaikan konflik dan menciptakan kehidupan yang damai adalah sejalan dengan salah satu pilar pendidikan yang dinyatakan oleh UNESCO (*United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization*) (Delors dalam Bunyamin Maftuh, 2005, hlm. 20) yaitu *learning how to live together in harmony*. Pendidikan tidak hanya sekedar

memberikan informasi dan pengetahuan saja akan tetapi pendidikan juga bertugas membentuk kesadaran bertanggung jawab dan pengambilan keputusan yang baik pada peserta didik. Untuk melakukan pencegahan dan menjembatani banyaknya fenomena konflik yang terjadi di sekolah, maka guru seharusnya dapat menghadirkan pembelajaran yang berpihak pada peserta didik dengan melakukan pengembangan aspek pengetahuan, sikap dan keterampilan. Menurut Robert M Gagne (dalam Sagala, 2009, hlm. 2) mengemukakan bahwa tipe belajar yang paling kompleks yaitu belajar memecahkan masalah. Pendidikan yang di dalamnya mengembangkan keterampilan resolusi konflik sangat diperlukan.

Jones dan Campton (2004, hlm. 233) menyatakan bahwa pendidikan resolusi konflik merupakan: *“Provides critical life skills necessary for building caring communities and establishing constructive relationships.”*. Artinya dengan pendidikan resolusi konflik siswa yang terlibat ataupun siswa yang tidak terlibat dalam konflik dapat memahami konflik dengan lebih baik, mampu mengendalikan emosi agar tidak berakibat negatif, dan memiliki keterampilan untuk memecahkan konflik secara konstruktif bukan secara destruktif. Selanjutnya menurut NCSS (*National Council Social Studies*) (2003), tujuan resolusi konflik dimaksudkan membantu peserta didik untuk menyadari hubungan-hubungan yang kompleks yang ada di antara manusia dan masyarakat serta fenomena alamiah, khususnya konsekuensi-konsekuensi jangka pendek dan jangka panjang dan meluas dan kompleksnya konflik sosial lokal, regional, nasional, dan global.

Sementara, Crawford and Bodine (1996, hlm.12) mengemukakan pendapat yang sama bahwa:

“Conflict resolution offers an alternative approach that brings the parties of the dispute together, provides them with the skills to resolve the dispute, and expects them to do so. In the conflict resolution process, those with ownership of the problem participate directly in crafting a solution”.

Artinya dengan mempelajari resolusi konflik, siswa yang terlibat konflik dapat ikut langsung dalam menyelesaikan konflik yang sedang dialaminya, siswa dipersiapkan untuk memiliki keterampilan menyelesaikan konflik sehingga dapat berkontribusi dalam menyelesaikan konflik yang berkembang dalam masyarakat. Bodine and Crawford (1996, hlm.11) merumuskan beberapa macam keterampilan

yang sangat penting dalam menumbuhkan inisiatif resolusi konflik diantaranya yaitu keterampilan orientasi, keterampilan persepsi, keterampilan emosi, keterampilan komunikasi, keterampilan berpikir kreatif dan keterampilan berpikir kritis.

Dalam penerapan pendidikan resolusi konflik tersebut, maka peran guru menjadi faktor terpenting untuk terwujudnya pendidikan resolusi konflik. Berdasarkan hasil penelitian Yayuk dkk (2018) bahwa keterampilan resolusi konflik pada siswa sekolah dasar di fasilitasi oleh guru. Dalam pengembangan kemampuan dasar resolusi konflik seorang guru perlu mengangkat konflik-konflik yang ada secara kontekstual. Pengertian Guru dalam Undang-Undang No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen pada pasal 1 disebutkan bahwa:

Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar dan pendidikan menengah.

Artinya bahwa didalam sebuah pendidikan guru memegang peranan penting yakni yang mengatur jalannya pendidikan dari tahap perencanaan, pelaksanaan sampai pada penilaian. Begitujuga apabila guru ingin mengimplementasikan pendidikan resolusi konflik maka guru memiliki peran-peran khusus dalam proses pembelajarannya. Jika dikaitkan antara pendidikan resolusi konflik dengan pembelajaran IPS maka seorang guru harus mampu menganalisis pada materi mana keterampilan resolusi konflik dapat diintegrasikan ke dalam pembelajaran IPS. Ahrari (dalam Ritiauw, 2019) menjelaskan bahwa guru adalah salah satu faktor yang sangat penting dalam menentukan kualitas pembelajaran IPS di kelas yang pada akhirnya berdampak pada peningkatan demokrasi dan terwujudnya pembelajaran yang damai. Guru merupakan *role model* atau contoh bagi peserta didik sehingga tampilan awal guru sangat berpengaruh terhadap kelanjutan pembelajaran para peserta didik.

Sukmadinata (dalam Ritiauw, 2019) mengemukakan guru memegang peranan penting dalam perencanaan maupun pelaksanaan kurikulum. Sehingga guru adalah perencana, pelaksana dan pengembang kurikulum bagi kelasnya. Supriadi (dalam Halimah, 2017) mengemukakan guru adalah seseorang yang harus

digugu dan ditiru oleh semua peserta didiknya. Oleh sebab itu seorang guru haruslah kompeten dan bersifat profesional khususnya dalam mengembangkan pembelajaran pendidikan resolusi konflik. Pentingnya guru dalam membelajarkan resolusi konflik kepada siswa agar siswa dapat mengembangkan keterampilan-keterampilan resolusi konflik dalam dirinya sehingga mampu dan mengetahui cara menyelesaikan konflik secara konstruktif dan demokratis. Yang tidak kalah penting bahwa guru adalah aktor kunci dalam menggambarkan nasib generasi suatu bangsa. Oleh karena itu, berhasil atau tidaknya suatu pembelajaran ditentukan oleh kualitas guru sebagai aktor kunci.

Menurut Ahrari (dalam Ritiauw, 2019) bahwa untuk mengukur kualitas guru dalam pembelajaran dapat dilihat dari dua aspek yakni dari aspek proses dan aspek hasil. Khususnya dalam pembelajaran resolusi konflik, dari aspek proses guru dikatakan berhasil apabila mampu melibatkan sebagian besar siswa secara aktif baik fisik, mental maupun sosial dalam proses pembelajaran resolusi konflik sehingga pembelajaran akan lebih bermakna bagi siswa. Dalam aspek hasil, guru dikatakan berhasil apabila pembelajaran yang diberikannya mampu memperbaiki mental perilaku siswa ke arah penguasaan kompetensi, sikap, keterampilan resolusi konflik. Dengan diperolehnya sejumlah kompetensi resolusi konflik siswa, berdampak pada siswa menjadi warga masyarakat yang mampu berinteraksi sosial dan berkomunikasi sosial, serta dapat menyelesaikan konflik secara demokratis dan konstruktif.

Oleh karena itu dalam penelitian ini, peneliti mencoba untuk menelusuri aspek penting peran guru dalam mengembangkan keterampilan resolusi konflik melalui pembelajaran IPS SD. Melalui studi dokumentasi diharapkan mendapat sejumlah informasi penting terkait dengan pengembangan keterampilan resolusi konflik bagi guru pada konteks pembelajaran IPS SD yang didukung dengan kajian-kajian teori yang relevan dan dapat dipertanggungjawabkan.

1.2 Rumusan Masalah Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, secara umum rumusan masalah dalam penelitian ini adalah “Bagaimana peran guru dalam mengembangkan keterampilan resolusi konflik siswa SD melalui pembelajaran IPS?”. Dari rumusan

masalah tersebut selanjutnya dijabarkan lebih khusus lagi ke dalam pertanyaan-pertanyaan sebagai berikut:

1. Bagaimana teori-teori diterapkannya pendidikan resolusi konflik?
2. Keterampilan-keterampilan resolusi konflik apa saja yang dapat dikembangkan dalam pembelajaran IPS SD?
3. Bagaimana peran guru dalam mengembangkan keterampilan resolusi konflik siswa melalui pembelajaran IPS SD?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dibuat, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui teori-teori diterapkannya pendidikan resolusi konflik.
2. Untuk mengetahui keterampilan-keterampilan resolusi konflik apa saja yang dapat dikembangkan dalam pembelajaran IPS SD.
3. Untuk mengetahui bagaimana peran guru dalam mengembangkan keterampilan resolusi konflik siswa melalui pembelajaran IPS SD.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun beberapa manfaat dari penelitian ini, yaitu:

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian diharapkan dapat menjadi kontribusi pemikiran mengenai peran guru dalam mengembangkan keterampilan resolusi konflik siswa. Diharapkan hasil penelitian ini dapat menjadi bahan pengembangan pembelajaran pendidikan resolusi konflik di sekolah dasar khususnya.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi guru

Penelitian diharapkan dapat menjadi masukan dan referensi mengenai gambaran peran guru di kelas dalam mengembangkan keterampilan resolusi konflik siswa dan guru terus mengingatkan siswa untuk tetap mengembangkan keterampilan resolusi konflik baik di sekolah maupun di lingkungan masyarakat.

b. Bagi siswa

Penelitian diharapkan dapat meningkatkan keterampilan resolusi konflik siswa. Misalnya keterampilan orientasi, keterampilan persepsi, keterampilan emosi, keterampilan komunikasi, keterampilan berpikir kreatif dan keterampilan berpikir kritis.

c. Bagi peneliti

Penelitian studi kepustakaan ini diharapkan peneliti mampu menambah wawasan pengetahuan mengenai keterampilan resolusi konflik. Hasil penelitian ini diharapkan dapat ditindaklanjuti melalui uji lapangan terkait dengan pendidikan resolusi konflik yang dikembangkan di sekolah dasar khususnya dalam mengembangkan keterampilan resolusi konflik melalui pembelajaran IPS SD.

1.5 Struktur Organisasi Skripsi

Struktur organisasi di dalam skripsi terdiri dari lima BAB yang mencakup berbagai unsur bahasan dari pelaksanaan penelitian.

Pada BAB I yaitu Pendahuluan, terdiri dari lima sub bab yakni latar belakang memaparkan permasalahan yang dijadikan bahan penelitian berupa situasi dan kondisi resolusi konflik yang terjadi pada siswa sekolah dasar, keterkaitan pembelajaran IPS dengan resolusi konflik dan urgensi peran guru untuk mengembangkan keterampilan resolusi konflik. Selain itu, bab ini memaparkan pula rumusan masalah yang menjadi tolak ukur dalam penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan struktur organisasi skripsi.

Pada BAB II yaitu Kajian Teori, membahas tentang teori-teori ataupun kajian pustaka dalam penelitian yang mencakup teori konflik seperti pengertian konflik dan resolusi konflik, teori-teori pendidikan resolusi konflik, keterampilan-keterampilan resolusi konflik yang akan dikembangkan melalui pembelajaran IPS, peran guru dalam mengembangkan keterampilan resolusi konflik serta hakikat dari pembelajaran IPS di sekolah dasar. Terdapat pula kerangka berpikir penelitian serta penelitian yang relevan dengan penelitian yang dilakukan.

Pada BAB III yaitu Metode Penelitian, membahas mengenai metode penelitian yang dilakukan. Pemaparannya mencakup beberapa pembahasan yakni metode penelitian kepustakaan (*library research*), sumber dan jenis data penelitian

berupa data primer dan data sekunder, teknik pengumpulan data yang berupa kepustakaan dan dokumentasi dengan teknik studi literatur. Dalam bab ini juga dibahas mengenai teknik analisis data yang mencakup reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Serta tahap penelitian dimulai dari tahap persiapan, tahap pelaksanaan dan tahap pengolahan data. Metode penelitian yang dilakukan yaitu penelitian deskriptif analitis teknik studi literatur.

Pada BAB IV yaitu Temuan dan Pembahasan, mencakup pada pembahasan hasil kajian beberapa sumber data buku, jurnal, artikel, sumber kepustakaan dan lainnya. Bab ini memaparkan pembahasan jawaban dari rumusan masalah yang ditanyakan. Yakni pembahasan mengenai prosedur penelitian yang dilakukan peneliti, temuan penelitian serta pembahasan mengenai teori-teori diterapkannya pendidikan resolusi konflik di sekolah, keterampilan-keterampilan resolusi konflik yang dapat diajarkan melalui pembelajaran IPS serta peran-peran guru dalam mengembangkan keterampilan resolusi konflik melalui pembelajaran IPS. Pembahasan dalam penelitian ini merupakan hasil pemikiran peneliti sendiri yang didukung oleh teori-teori yang relevan.

Pada BAB V yang mencakup penutup yaitu simpulan, implikasi dan rekomendasi dari pelaksanaan penelitian yang telah dilakukan. Simpulan membahas berdasarkan jawaban dari rumusan masalah, implikasi berupa manfaat kedepannya dari penelitian ini, serta rekomendasi membahas agar penelitian ini dapat dijadikan rekomendasi literatur untuk bahan yang dapat digunakan oleh pihak yang berkaitan dengan implementasi penelitian model resolusi konflik ataupun untuk pelaksanaan penelitian selanjutnya.

Adapun skripsi ini mencakup pula lampiran-lampiran yang berkaitan dengan penelitian. Yakni lampiran mengenai buku bimbingan dan surat keputusan dosen pembimbing.